

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan di wilayah pemerintah bawah yaitu kelurahan merupakan kewajiban pemerintah. Konsep negara sejahtera (*welfare state*) merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran penting pada masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Pemerintah membentuk sistem birokrasi dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintahan desa maupun kelurahan supaya dapat menggerakkan potensi-potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang handal serta bekerja secara efektif dan efisien sehingga mampu menjalankan organisasi birokrasi pemerintahan serta administrasi pembangunan guna mencapai hasil yang diharapkan (Suharto, 2015).

Pembangunan di masyarakat berkaitan dengan pengembangan berbagai aktifitas kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan. Kehidupan masyarakat kota yang cenderung heterogen dan selalu berkembang ke arah modernisasi, yang ditandai dengan sikap kritis yang menuntut pemerintah lebih tanggap dalam menanggapi persoalan yang ada. Hal tersebut, dapat diartikan semakin meningkatnya kualitas hidup dalam aspek kehidupan akan membutuhkan upaya pembangunan serta pembaruan. Guna memenuhi tuntutan, pemerintah wajib memperbaiki serta menyempurnakan berbagai kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan otonomi di daerah.

Menurut Rogers (Rochajat,dkk:2011:3) pembangunan adalah perubahan menuju suatu sistem sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan bidang sosial, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang kondusif bagi pembaruan, pembangunan, serta pembinaan bangsa. Pembangunan meliputi dua unsur yakni ateri yang akan dihasilkan dan dibagagi serta manusia pembangun, karena pembangunan hakikatnya ditujukan

pada pembangunan manusia. Dalam pembangunan partisipatif harus ada dorongan dari pemerintah agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) menjabarkan pentingnya pembangunan partisipatif, sebagai berikut :

- a. Partisipasi memiliki makna apa yang dijalankan merupakan bagian dari usaha bersama yang dijalankan bersama-sama untuk membangun masa depan bersama,
- b. Sebagai kerja guna mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang berlatar belakang beragam dalam negara atau dasar hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan bantuan demi membangun masa depan yang baru,
- c. Partisipasi bukan hanya memberikan bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan tetapi juga dalam pembangunan nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial yang dijunjung.
- d. Partisipasi pembangunan bermakna mendorong menuju ke arah yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memelihara agar lingkungan hidup terjaga.

Pembangunan kalurahan merupakan hal penting untuk lebih dulu dibangun, serta masyarakat yang dibenahi. Masyarakat merupakan bagian inti penggerak kemauan kalurahan. Jika suatu kalurahan mengalami ketidakseimbangan terhadap keinginan serta partisipasi masyarakat maka sulit untuk mengajak masyarakat bersama-sama membangun kalurahan. Pembangunan kalurahan yang berlangsung dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga dapat memicu perkembangan ekonomi atau perkembangan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah terhadap masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang ada di wilayah kalurahan. Peran aktif masyarakat berpengaruh penting dalam terciptanya pembangunan secara partisipatif secara perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Lembaga masyarakat kalurahan dibentuk guna membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan pembangunan di tingkat desa, pemerintah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) . LPMK memiliki tugas merencanakan , melaksanakan dan pengendalian pembangunan partisipatif dengan memberdayakan masyarakat yang ada. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPMK memiliki fungsi yaitu :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan,
2. Penanaman dan pemupukan peratuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI,

3. Peningkatan kualitas serta percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
4. Menyusun rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan terhadap hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan serta mengembangkan dan sebagai pemrakarsa, partisipasi serta gotong royong,
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan keserasian lingkungan hidup (Irawan, 2015).

Kelurahan Pandowan memiliki luas 140.3610 Ha berupa dataran rendah, terbagi menjadi 4 padukuhan dan berpenduduk 2.253 jiwa (<http://pandowan-kulonprogo.desa.id/index.php/first>). Karena pentingnya pembangunan di seluruh aspek, maka hadirilah lembaga yang disebut LPMK yang bergerak dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat kalurahan. Dengan adanya lembaga ini pemerintah berharap terjadinya pemerataan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah kalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Pandowan merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan gotong royong, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan. Hal tersebut sesuai PERBUP (Peraturan Bupati) Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Kalurahan Pandowan merupakan salah satu Kaluraham yang berada di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan perbup tersebut, LPMK mempunyai fungsi serta tugas yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Fungsi dan tugas tersebut diantaranya sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menswadayakan masyarakat dalam pembangunan di kalurahan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kinerja dari LPMK Kalurahan Pandowan dalam pembangunan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai. Selain itu, peneliti juga tertarik mengenai bagaimana cara kerja LPMK dalam menswadayakan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi tersebut diawali dari tahap awal sampai akhir, dan juga apakah hasil pembangunan yang dilakukan berguna bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya persepsi mengenai kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) merupakan masalah penting yang perlu dilihat lebih lanjut dalam rangka mewujudkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) yang lebih baik. Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul tentang

“Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Dalam Pembangunan di Kalurahan Pandowan, Kabupaten Kulon Progo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) dalam membantu Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan di Kalurahan Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) dalam pembangunan di Kalurahan Pandowan Kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Untuk menggambarkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) dalam pembangunan di Kalurahan Pandowan Kabupaten Kulon Progo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat untuk :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan seputar kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) di Indonesia khususnya di Kalurahan Pandowan,
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan kontribusi untuk dijadikan tambahan referensi atau bahan pustaka yang berupa penelitian ilmiah.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pisau analisis pemberdayaan masyarakat,
- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai ajang latihan serta pengembangan dan mengamati masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan.

1.5. Sistematika Bab

Penulisan laporan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang berisikan sub-sub mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang temuan-temuan yang ditemukan di lapangan oleh peneliti serta dibahas lebih detail dan rinci.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir laporan penelitian yang berisi kesimpulan sekaligus sikap akhir penulis mengenai pembahasan yang ada di dalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan hasil pemikiran yang berupa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

